

**Dinamika Keamanan Indo-Pasifik dan Uni Eropa Terkait Aliansi  
AUKUS****Akmal Tawakal***Universitas Singaperbangsa Karawang*  
2010631260015@student.unsika.ac.id**Abstrak**

*Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan dinamika keamanan di wilayah Indo-Pasifik dan Uni Eropa yang disebabkan oleh Aliansi Aukus yang didasari security dilemma akibat peningkatan kekuatan militer Tiongkok. Penulisan artikel ini menggunakan teori neorealisme dan konsep security dilemma untuk menganalisis respon negara-negara di wilayah Indo-Pasifik dan Uni Eropa terkait pembentukan Aliansi AUKUS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus, dimana tindakan negara-negara di wilayah Indo-Pasifik dan Uni Eropa mengecam kebijakan yang tertuang dalam Pakta Aukus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi literature dan sumber yang diperoleh dari internet. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pembentukan Aliansi Aukus yang diinisiasi oleh Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat ini telah membuat negara-negara di wilayah Indo-Pasifik dan Uni Eropa merasa terancam akan keamanan nasional mereka. Termasuk didalamnya adalah respon dari negara Tiongkok sendiri dalam menanggapi Aliansi AUKUS yang dianggap dapat memulai perlombaan senjata (arms race) di wilayah Indo-Pasifik.*

**Kata Kunci:** Aliansi AUKUS, Security Dilemma, Indo-Pasifik, Uni Eropa

**Abstract**

*This article aims to explain security dynamics change in Indo-Pacific and European Union which caused by AUKUS Alliance based on security dilemma effect of military enhancement by Tiongkok. This article used neorealism theory and security dilemma concept to analyze states response in Indo-Pacific and European Union about AUKUS Alliance establishment. The method used in this article is analytical descriptive qualitative with study case approach, where action by states in Indo-Pacific and European Nation criticize the regulation in AUKUS Pact. Techniques of data collecting through literature and sources from the internet. The result of this article showed that AUKUS Alliance establishment started by Australia, United Kingdom, and United States has threatened states in Indo-Pacific and European Nation about their national security. Including response from Tiongkok repercussions about AUKUS Alliance considered initiated arms race in Indo-Pacific.*

**Keywords:** AUKUS Alliance, Security Dilemma, Indo-Pacific, European Nation

**PENDAHULUAN**

Strategi memiliki banyak definisi dengan perbedaan yang signifikan satu sama lain. Carl von Clausewitz mendefinisikan strategi sebagai berikut: “*Strategy (is) the use of engagements for the object of war*” (strategi adalah penggunaan dalam pertempuran untuk keperluan peperangan). Definisi “strategi” menurut Carl von Clausewitz berfokus pada ranah kekuasaan militer yang merujuk pada peperangan. Kesimpulan tersebut diambil dengan merujuk “keahlian militer” pada masa Yunani Kuno. Berbeda halnya dengan Clausewitz yang memfokuskan definisi strategi dalam ranah militer, Gregory D Foster berpendapat bahwa: “*Strategy is ultimately about effectively exercising power*” (strategi tak lain tentang cara penggunaan power secara efektif). Power yang dimaksud oleh Foster tidak hanya berkaitan dengan militer, melainkan juga membahas penggunaan sumber daya, ideologi, hingga kebudayaan agar dapat mendapat hasil yang maksimal. Tidak berbeda jauh dengan pendapat Foster, Robert Osgood juga menyampaikan aspirasinya mengenai definisi strategi: “*Strategy must now be understood as nothing less the overall plan for utilizing the capacity for armed coercion in conjunction with economic, diplomatic, and psychological instruments of power to support foreign policy most effectively by overt, covert and tacit means*” (strategi dewasa ini harus dipahami tidak kurang dari keseluruhan rencana untuk memanfaatkan kekerasan bersenjata, namun juga berhubungan dengan perekonomian, diplomasi, dan instrumen psikologis dari power untuk mendukung politik luar negeri dengan maksud terbuka, tersembunyi, maupun diam-diam). Osgood menegaskan keberadaan ekonomi, diplomasi, dan instrumen power lainnya dalam mendukung politik luar negeri juga tidak kalah penting dari kekuatan militer terutama di era globalisasi ini. Selain ketiga tokoh tersebut, Murray dan Grimsley berpendapat bahwa: “*Strategy is a process, a constant adaptation to the shifting conditions and circumstances in a world where chance, uncertainty, and ambiguity dominate*” (strategi adalah proses, terus beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan keadaan di dunia yang mana perubahan, ketidakpastian, dan ambiguitas mendominasi). Berbeda dengan ketiga tokoh sebelumnya yang mendefinisikan strategi yang berkaitan dengan militer ataupun cara mempengaruhi pihak lain, Murray dan Grimsley justru menyimpulkan bahwa definisi tidak lain adalah proses beradaptasi akan perubahan yang terjadi di dunia.

Bila menelisik dari beragam pendapat para pakar di atas, definisi strategi selalu berubah sudut pandang seiring dengan berkembangnya zaman. Awalnya mereka yang menganggap strategi hanya berfokus untuk mencegah dan menanggulangi isu “politik tingkat tinggi” (*high politics*) yang menyangkut isu politik, keamanan, dan strategis, hingga akhirnya isu yang dibahas meluas pada isu “politik tingkat bawah” (*low politics*) yang meliputi isu diplomasi, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Walau terdapat dua perbedaan dalam menyikapi isu yang dibahas, pada dasarnya semua dilakukan untuk kepentingan politik “*the theory and practice of the use, and threat of use, of organized force for political purposes*”(Gray,1999).

Sama halnya dengan peristiwa yang baru-baru ini menggemparkan dunia hubungan internasional yang mana terjadi kesepakatan antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat terkait perjanjian keamanan internasional yang dirangkum dalam Pakta AUKUS. Nama AUKUS sendiri diambil dari akronim tiga negara yang menginisiasi perjanjian tersebut, yaitu Australia, United Kingdom (Britania Raya), dan United States (Amerika Serikat). Pakta tersebut meliputi kerja sama teknologi kecerdasan buatan, siber, kuantum, sistem bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh yang akan berlangsung 18 bulan ke depan. Tujuan dibuatnya kesepakatan ini untuk mengimbangi kekuatan militer Tiongkok yang dinilai semakin meluas dan berpotensi membahayakan wilayah Indo-Pasifik.

Sekilas memang tidak terlihat adanya kejanggalan dalam kesepakatan tersebut. Namun bila kita perhatikan lebih jeli isi kesepakatan tersebut, terlihat bahwa adanya potensi Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi dari Britania Raya dan Amerika Serikat. Proyek kapal selam ini bertujuan untuk melanjutkan pembangunan kapal selam kelas Collins dari *Project Sea 1000*. Proyek yang sebelumnya tertunda karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nuklir, kini kembali berjalan setelah dibantu oleh Amerika Serikat sebagai pemasok bahan bakar nuklir dengan bantuan desain yang dibuat oleh Britania Raya. Walaupun begitu, Menurut kesepakatan Internasional, hanya negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa saja yang diberi izin untuk mengembangkan serta melakukan

pengayaan uranium untuk senjata nuklir, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Tetapi Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, dengan tegas menepis tuduhan bahwa mereka akan melakukan pengayaan uranium sendiri melainkan mengambil dari Amerika Serikat yang akan memasok uranium yang telah melalui proses pengayaan.

Pakta AUKUS ini pun memicu beragam respon dari berbagai pihak baik perwakilan masing-masing negara hingga pengamat hubungan internasional. Kegaduhan pun mulai terjadi di kawasan Indo-Pasifik karena dikhawatirkan wilayah tersebut akan mengalami *security dilemma* dari segi kekuatan militer. Tiongkok pun tidak tinggal diam dan mengkritisi pemberlakuan Pakta AUKUS dapat mengganggu stabilitas regional. Uni Eropa turut menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kesepakatan tersebut karena diperkirakan akan berdampak pada perekonomian wilayah mereka, khususnya untuk negara Prancis.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Neorealisme**

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa artikel ini berusaha menganalisis respon negara-negara di wilayah Indo-Pasifik dan Uni Eropa menggunakan teori neorealisme dan konsep *security dilemma*. Teori neorealisme lahir dari perombakan pemikiran-pemikiran realis klasik seperti E.H. Carr, Hans Morgenthau dan Reinhold Niebuhr. Walaupun begitu, neorealisme memiliki dasar bahwa struktur internasional pada hakikatnya adalah sebuah anarki yang tidak mempunyai kekuatan supranasional yang jelas dalam mengatur negara-negara ditambah dengan perubahan tujuan dari masing-masing negara yang tidak pernah tetap (Mearsheimer, (2007)). Pemikiran neorealisme dianggap menjadi dasar pemikiran atas kondisi dunia kini, dimana suatu negara tidak pernah bisa menebak kehendak negara lain di masa depan. Kurangnya rasa percaya terhadap negara lain menyebabkan masing-masing negara sibuk memperkuat keamanan negara mereka

untuk bertahan hidup. Dengan meningkatkan keamanan masing-masing negara, diharapkan dapat mencegah rasa ingin menguasai wilayah negara lain dan terciptanya keseimbangan *power*.

Walaupun termasuk pengembangan dari teori realisme, neorealisme mempunyai beberapa perbedaan antara sama lain. Realis berpendapat bahwa kerja sama antar negara bagaikan hisapan jempol belaka karena masing-masing negara sibuk untuk memenuhi *power* secara domestik saja. Sedangkan neorealisme tidak menyangkal adanya peluang kerja sama antar negara bagian dapat terjadi. Namun, mereka memandang bahwa negara yang bekerja sama akan selalu berusaha untuk memaksimalkan baik kekuasaan relatif maupun mempertahankan otonomi mereka (Jackson & Sorensen, 2013). Neorealisme memandang komunikasi antar negara melalui sistem internasional yang bersifat anarkis, yang berarti sistem internasional yang tidak memiliki suatu pemimpin dan tidak mempunyai peraturan untuk mengatur tindakan suatu negara. Dengan sistem internasional yang bersifat anarki, para aktor pemerintah maupun non pemerintah, harus dapat beradaptasi dalam segala kondisi. Karena ketidakhadiran suatu peraturan dalam sistem internasional, para aktor lebih mementingkan kelangsungan negaranya sendiri dan berfokus pada peningkatan *security*.

### **Konsep *Security Dilemma***

Konsep *security dilemma* dapat diartikan sebagai sebuah fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara yang mana tindakan sebuah negara tersebut untuk meningkatkan keamanannya akan berimbas atau dianggap melemahkan keamanan negara lainnya (Jervis, 1978). *Balance of power* dapat terjadi bila keseimbangan antara *offense* dan *defense* dapat terpenuhi. Apabila *offense* mendominasi maka *security dilemma* akan meningkat, yang akan mengakibatkan negara-negara lain berlomba untuk meningkatkan keamanan negara mereka masing-masing atau sering disebut *arms race*. Namun, *arms race* dapat dicegah bila *defense* lebih dominan ketimbang *offense* (Glaser & Kauffman, 1998). Teori *offense-defense* memberikan sebuah pandangan baru terhadap politik internasional yang meyakini

bahwa perang dapat dicegah ketika kekuatan *defense* suatu negara dianggap mengungguli kekuatan *offense* negara di sekitar kawasannya.

Kecocokan atau ketidakcocokan ideologi antar negara dapat menimbulkan salah persepsi yang berujung konflik. Hal tersebut rawan terjadi dalam hubungan antar negara. Para aktor akan berusaha untuk mencegah konflik itu terjadi dengan meningkatkan keamanan negara. Dalam hal ini termasuk ke dalam *security dilemma* antar negara yang kerap meruncing pada terjadinya *arms race* (Roe, 1999). Peristiwa ini didasari dengan rasa takut dan rasa saling percaya bahwa suatu hari akan ada negara lain yang menebar ancaman terhadap keamanan negaranya. Dan di saat itulah negara tersebut akan merasa perlunya meningkatkan keamanan negara mereka demi mencegah terjadinya konflik.

## **PEMBAHASAN**

### **Keresahan yang Timbul di Wilayah Indo-Pasifik**

Secara geografis wilayah Indo-Pasifik merujuk pada kawasan yang membentang dari bagian timur Samudera Hindia ke Samudra Pasifik bagian barat dan terhubung dengan Selat Malaka. Indo-Pasifik telah menjadi pusat kegiatan geopolitik maritim, keamanan, perdagangan, dan lingkungan (Passarelli, 2014). Wilayah Indo-Pasifik terkenal akan ramainya aktivitas perdagangan dan kegiatan perekonomian lainnya. Contohnya adalah peranan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran sekaligus perdagangan yang menghubungkan India, China, serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), organisasi yang bernaung di Asia Tenggara lebih menempatkan dirinya untuk berfokus dalam mensejahterakan serta menciptakan kestabilan ekonomi untuk setiap negara di Asia Tenggara.

Namun, fokus ASEAN tersebut berubah secara drastis setelah Pakta AUKUS tercipta. Pakta AUKUS yang diciptakan dengan tujuan untuk meredam kekuatan militer China di wilayah Indo-Pasifik, justru menjadi bumerang tersendiri untuk negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara kini sedang mengalami *security dilemma*

karena diapit oleh dua kekuatan militer yang masif dari Tiongkok dan Aliansi AUKUS. Selain itu, salah satu kebijakan Pakta AUKUS yang memungkinkan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dianggap dapat membahayakan. Banyak negara di Asia Tenggara berpendapat kehadiran kapal selam bertenaga nuklir di Australia melanggar *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT). NPT adalah perjanjian internasional yang mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata untuk menekan penggunaan energi nuklir demi tujuan damai serta mencapai perlucutan senjata nuklir.

Ragam komentar dan kritik muncul dari banyak negara terkait Aliansi AUKUS. Salah satunya datang dari Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, Perdana Menteri Malaysia yang dijabat oleh Ismail Sabri Yaakob, serta Wakil Presiden Akademi Diploma Vietnam, Nguyen Hung Son. Menurut Retno Marsudi, Indonesia dan negara-negara di ASEAN lainnya selalu mengedepankan dialog dalam penyelesaian suatu masalah secara damai sebagai bukti penghormatan terhadap hukum internasional salah satunya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Sementara itu Ismail Sabri Yaakob memandang Aliansi AUKUS dapat memprovokasi kekuatan lain di kawasan Asia-Pasifik terutama di Laut Natuna Utara dan berpotensi melanggar prinsip menjaga ASEAN sebagai *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Nguyen Hung Son berpendapat pembentukan Pakta AUKUS ini terkesan mendadak dan tidak transparan karena tidak adanya diskusi terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan ASEAN.

Walaupun banyak negara yang mengkritik dan kontra terhadap Aliansi AUKUS, ada beberapa negara yang justru mendukung terciptanya Aliansi AUKUS. Dukungan tersebut datang dari Filipina yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, serta dukungan Singapura yang disampaikan oleh Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Menurut Teodoro Locsin, peningkatan kapasitas militer Australia melalui Aliansi AUKUS ini dapat membantu negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman di kawasan Indo-Pasifik yang datang dari Tiongkok. Senada dengan Menteri Filipina, Lee

Hsien Loong selaku Perdana Menteri Singapura mendukung Aliansi trilateral ini dengan harapan dapat menciptakan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara.

Kondisi di Laut Natuna Utara sendiri, mengalami peningkatan tegangan. Menurut Angkatan Laut Indonesia, mereka mendeteksi kapal-kapal milik Tiongkok dan Amerika Serikat lebih banyak dibanding sebelumnya. Terdapat enam kapal milik Tiongkok termasuk satu kapal perang dan beberapa kapal milik Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi ketakutan tersendiri kepada para pemancing yang merasa berada di tengah peperangan dan mengganggu aktivitas memancing mereka. Mereka takut bila suatu saat nanti Laut Natuna Utara akan dipenuhi oleh kapal perang baik dari negara China maupun pihak Aliansi AUKUS yang berpotensi mengundang terjadinya *arms race*.

Meskipun ragam respon telah diutarakan oleh beberapa negara ASEAN, namun ASEAN tidak dapat dan tidak diperbolehkan ikut campur terkait Aliansi AUKUS. Hal ini didasari oleh prinsip yang dianut negara-negara ASEAN untuk tidak mencampuri urusan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara yang tertuang dalam Kebijakan Non-Interferensi ASEAN. Contoh lain dari penerapan kebijakan ini ketika terjadinya sebuah kudeta oleh militer di Myanmar yang menggulingkan Win Myint beserta pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Walaupun berada dalam satu kawasan regional, tetapi tidak ada negara-negara ASEAN lainnya yang berani mengambil sikap dan ikut campur dalam penanganan masalah tersebut.

### **Gejolak yang Terjadi Pada Uni Eropa**

Uni Eropa merupakan organisasi antarpemerintahan yang beranggotakan beberapa negara di regional Eropa. Uni Eropa terkenal sebagai organisasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia. Uni Eropa menekankan prinsip multilateralisme dalam pelaksanaan hubungan internasional. Namun dari beragam kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa baik dengan negara maupun sesama aktor internasional, hubungan antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat menjadi topik yang paling menarik untuk dibahas. Sering terjadinya perbedaan prinsip serta persepsi antara kedua pihak ini, mengindikasikan hubungan yang tidak begitu akur. Apalagi ketika kedua pihak ini



bertindak sebagai penengah isu yang berkembang di dunia, terkadang justru memperumit masalah yang sudah ada karena perbedaan pendapat dalam cara penyelesaian suatu kasus.

Baru-baru ini hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa terlihat semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut diawali dengan ketidaksetujuan Uni Eropa dalam tindakan yang diambil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam menangani isu di Afghanistan. Hubungan kedua pihak ini semakin diperkeruh dengan aliansi baru yang bernama AUKUS yang dibuat dengan dua sekutu lainnya, Britania Raya dan Australia. Menanggapi aliansi tersebut, Uni Eropa mengumumkan strategi di kawasan Indo-Pasifik sehari setelah pembentukan Aliansi AUKUS diumumkan, yang secara efektif menekan jalur independennya di kawasan tersebut. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memperingatkan Eropa tentang kepercayaan kepada Amerika Serikat dan percaya bahwa Eropa dapat memainkan peran strategis dalam menstabilkan kekuatan regional setelah pembentukan Aliansi AUKUS di wilayah Indo-Pasifik.

*Trust issue* yang dimiliki Prancis terhadap Amerika Serikat bukan saja disebabkan oleh pembentukan Aliansi AUKUS. Sebelumnya Prancis telah kehilangan kesepakatan yang dinilai setara dengan US\$65 miliar atau setara dengan Rp. 925 triliun dengan Australia dalam penyediaan kapal selam konvensional tenaga diesel. Pembatalan kesepakatan tersebut berdampak pada sektor ekonomi dan pertahanan Prancis. Sebelumnya Australia berencana membeli 12 kapal selam dari Naval Group, pembuat kapal Prancis, secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian menyebut keputusan Amerika untuk mengecualikan sekutu Eropa dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah Indo-Pasifik disebut mengurangi penghormatan terhadap multilateralisme yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

Perbedaan pendapat antara Aliansi Aukus dan Uni Eropa dalam pendekatan terhadap Tiongkok dan negara-negara di wilayah Indo-Pasifik, membuat terjadinya tabrakan kepentingan. Amerika yang memandang Tiongkok sebagai ancaman keamanan wilayah Indo-Pasifik, sedangkan Uni Eropa tengah gencar menyerukan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Namun Aliansi

AUKUS benar-benar tidak memberi kesempatan bagi Uni Eropa untuk menangani masalah tersebut dan langsung mendeklarasikan fokus keamanan di wilayah Indo-Pasifik tanpa sekalipun berdiskusi dengan pihak Uni Eropa.

### **Tanggapan Tiongkok Terhadap Aliansi AUKUS**

Tiongkok merupakan negara yang terletak di Asia Timur yang dianggap dapat menyaingi Amerika Serikat terutama dalam sektor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran angka ekspor barang serta penyebaran teknologi yang meluas di seluruh dunia. Selain sektor ekonomi, kini Tiongkok berupaya untuk membangun kekuatannya di bidang keamanan tepatnya militer. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok tengah melakukan modernisasi militer dengan mengadopsi pendekatan unilateral. Hal tersebut ditujukan untuk kepentingan keamanan nasional negara serta mengembangkan daya jangkauan angkatan perangnya terkait konflik dengan Taiwan. Hampir tiap tahunnya, Tiongkok menaikkan persentase anggaran militer di atas 10 persen. Terjadinya peningkatan anggaran pertahanan tiap tahunnya, menjadi bukti keseriusan Tiongkok dalam usaha memperkuat kekuatan militer negara. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2020, Tiongkok memiliki sekitar 350 kapal termasuk 130 kombatan permukaan. Tiongkok juga disinyalir mempunyai 50 kapal perusak, 72 korvet, 132 kapal patroli, serta 36 kapal penyapu ranjau. Tiongkok memiliki 79 unit kapal selam yang mana 12 diantaranya termasuk kapal selam bertenaga nuklir.

Peningkatan kekuatan militer Tiongkok tersebut menimbulkan ragam persepsi dari beberapa negara terkait kebenaran tujuan mereka. Baik negara-negara tetangga hingga negara yang berbeda regional sekalipun turut merasa ketakutan dengan tindakan Tiongkok. Salah satu negara yang merasa paling cemas terhadap tindakan Tiongkok tersebut adalah Amerika Serikat. *Security Dilemma* yang dirasakan Amerika Serikat merupakan alasan dan latar belakang terciptanya Aliansi AUKUS. Aliansi AUKUS hadir sebagai bentuk pencegahan Amerika Serikat dalam mencegah berkembangnya kekuatan militer Tiongkok yang dianggap dapat membahayakan wilayah Indo-Pasifik.

Tiongkok tidak tinggal diam menanggapi pembentukan Aliansi yang melibatkan tiga negara ini. Menteri Luar Negeri China, Zhao Lijian, menganggap aliansi yang melibatkan pengembangan nuklir merupakan tindakan yang tak bertanggung jawab dan berpotensi melanggar perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Senada dengan pendapat Zhao Lijian, juru bicara kedutaan Tiongkok di Amerika Serikat, Liu Pengyu, berpendapat bahwa aliansi tersebut hanya sekedar trauma mentalitas Perang Dingin yang belum terobati serta prasangka belaka. Tiongkok justru menganggap kehadiran Aliansi AUKUS adalah musuh sebenarnya yang dapat membahayakan keamanan wilayah Indo-Pasifik. Dengan hadirnya Pakta AUKUS yang memperbolehkan Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir, akan menimbulkan *security dilemma* di wilayah tersebut dan berpotensi menginisiasi *arms race*.

Sebagai tindak lanjut dari adanya Aliansi AUKUS, Tiongkok berencana akan bertindak lebih agresif untuk menunjukkan eksistensinya di wilayah Laut Natuna Utara. Tiongkok sama sekali tidak gentar terhadap Aliansi AUKUS dan hanya menganggap aliansi tersebut hanyalah gertakan belaka sebagai provokasi untuk memancing Tiongkok agar melakukan tindakan ceroboh agar Amerika Serikat dapat melancarkan serangan balasan. Tiongkok juga berharap agar ASEAN ikut menolak Pakta AUKUS dalam rangka mematuhi perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan mencegah bahaya yang dapat timbul sebagai ancaman keamanan regional di wilayah Indo-Pasifik.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan anggaran militer Tiongkok tiap tahunnya, membuat Amerika Serikat mewaspadaai pergerakan Tiongkok yang berpotensi membahayakan wilayah Indo-Pasifik ke depannya. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat merespon tindakan Tiongkok dengan membuat aliansi yang didasari oleh pakta yang bernama sama yaitu AUKUS. Respon Amerika Serikat tidak lain karena ketakutan dan adanya *security dilemma* semata.

Namun justru menurut beberapa negara di ASEAN, tindakan Amerika Serikat membentuk Aliansi AUKUS di wilayah mereka yang lebih berpotensi membahayakan keamanan regional serta ditakutkan dapat menimbulkan *arms race* di kawasan Asia-Pasifik.

Pembentukan Aliansi AUKUS yang merupakan perjanjian trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat turut mengganggu kestabilan serta hubungan negara-negara tersebut dengan Uni Eropa. Sebut saja Prancis yang merasa dikhianati oleh keberadaan aliansi tersebut. Akibat adanya Aliansi AUKUS, kesepakatan yang hampir terjalin antara Australia dengan Prancis mengenai pembelian kapal selam konvensional bertenaga diesel kandas begitu saja. Padahal kesepakatan tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian serta keberlangsungan pertahanan Prancis. Sebagai negara tetangga antara Prancis dan Britania Raya, Prancis turut mengecam Britania Raya karena tidak adanya dialog kepada Uni Eropa untuk turut ambil peran dalam Aliansi AUKUS dan dianggap ikut menghasut Australia untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Akibatnya hubungan antara Uni Eropa dengan ketiga negara tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

Tiongkok turut buka suara terhadap adanya Pakta AUKUS yang dinilai membahayakan keamanan regional Asia-Pasifik karena memperbolehkan Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Asia-Pasifik yang terkenal sebagai wilayah perekonomian dan jalur perdagangan dapat terganggu akibat kehadiran Aliansi AUKUS. Perubahan fokus sektor ekonomi menjadi kepentingan keamanan ditakutkan dapat mengganggu kestabilan negara-negara yang terlibat. Belum lagi adanya ancaman *arms race* yang kapan saja dapat merubah wilayah Asia-Pasifik menjadi medan perang.

Tindakan yang diambil Amerika Serikat terkesan gegabah serta tanpa perhitungan. Tidak adanya dialog terlebih dahulu dengan Tiongkok mengenai maksud dan tujuan yang jelas membuat kesalahpahaman yang terus mengakar. Tanpa adanya diskusi dengan pihak Uni Eropa berakibat pada memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Apalagi dengan keberadaan Pakta AUKUS menjadi faktor utama kegagalan kesepakatan antara Australia dan Prancis mengenai pembelian kapal selam konvensional

bertenaga diesel. Pihak ASEAN yang tidak mendapat informasi sebelumnya terkait pembentukan Aliansi AUKUS, justru mengalami *security dilemma* dan takut wilayahnya akan menjadi medan perang dimana adanya potensi *arms race* akan terjadi.

Dapat dilihat dari fenomena ini bahwa Amerika Serikat masih belum bisa terlepas dari trauma mereka terhadap mentalitas Perang Dingin. Tidak adanya dialog terlebih dulu dan langsung mengambil tindakan bersifat keamanan yang berdasar dari ketakutan dan *security dilemma* belaka. Seakan tidak pernah belajar dari pengalaman tersebut, tidak aneh bila sejarah kelam dahulu dapat terulang lagi. Seharusnya Amerika Serikat dapat membentuk sikap dan tindakan dengan kepala dingin sebagai negara adidaya yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan dunia serta sistem internasional. Bila ditelisik lebih dalam kemungkinan adanya kepentingan pribadi Amerika Serikat dalam mencegah peningkatan kekuatan militer Tiongkok, mungkin berangkat dari persaingan kedua negara ini baik dari sektor ekonomi maupun teknologi. Sikap ketidakdewasaan Amerika Serikat dapat menuntun pada keputusan dan kebijakan yang dapat membahayakan negaranya sendiri secara khusus bahkan seluruh dunia secara umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Bekkevold, J. I., Bowers, I., & Raska, M. (Eds.). (2015). *Security, strategy and military change in the 21st century: cross-regional perspectives*. Routledge.
- Burchill, Scott, Linklater, A., Devetak, R., Paterson, M., Donnelly, J., Reus-Smit, C. and True, J. 2005, *Theories of International Relations. 3rd ed.. Edited by Burchill, Scott, Palgrave Macmillan, New York, N.Y.*
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5<sup>th</sup> ed.). United Kingdom: Oxford University Press.
- Passarelli, D, M. (2014). *Sea Change: Evolving Maritime Geopolitics in the Indo-Pacific Region*. Washington DC: Stimson Center.
- Wirtz, J. (2000). *Strategy in The Contemporary World. The Institute for Joint Warfare Analysis Naval Postgraduate School Monterey, California.*

### **Jurnal :**

- Colin S. Gray (1999). Strategic Culture as Context the First Generation of Theory Strikes Back. *Review of International Studies*, 25, 49-69

- Floyd, R. (2007). Towards a Consequentialist Evaluation of Security Bringing Together the Copenhagen and the Welsh Schools of Security Studies. *Review of International Studies Vol. 33, No. 2, 327-350*
- Glaser, C., & Kauffman, C. (1998). What is the offense-defense balance and can we measure it? *International Security, 44-82*.
- Gray, C. S. (1977). Across the Nuclear Divide-Strategic Studies, Past and Present. *International Security, 24-46*.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under Security Dilemma. *World Politics, 30(2), 167-214*.
- Mearsheimer, J. J. (2007). Structural Realism. *International Relations Theories: Discipline and Diversity, 83*
- Roe, P. (1999). The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a Tragedy?. *Journal of Peace Research, 36(2), 183-202*.
- Satris, R. (2015). Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 95-104*.
- Woolner, D. (2009). Taking the past to the future: The Collins submarine project and sea 1000. *Security Challenges, 5(3), 47-71*.

**Internet :**

- ABC News, (2021, September 16), "China Condemns AUKUS Pact, Tony Abbott Flags a 'Common Danger', Kevin Rudd Urges Caution", dipetik Oktober 13, 2021, dari <https://www.abc.net.au/news/2021-09-16/aukus-china-foreign-ministry-condemns-agreement-abbott-rudd/100468900>
- CNBC Indonesia, (2021, Oktober 9), "Dikepung Senjata Nuklir, RI & Negara ASEAN Panik & Terancam", Dipetik Oktober 23, 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211009112147-4-282620/dikepung-senjata-nuklir-ri-negara-asean-panik-terancam>
- CNN Indonesia, (2021, Oktober 7), "Pengamat: RI-ASEAN Harus Cegah Bola Nuklir akibat AUKUS", dipetik Oktober 23, 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211007120344-113-704574/pengamat-ri-asean-harus-cegah-bola-liar-nuklir-akibat-aukus>
- CNN Indonesia, (2021, Oktober 12), "Malaysia Minta ASEAN Kompak Sikapi AUKUS", dipetik Oktober 24, 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211012145630-106-706673/malaysia-minta-asean-kompak-sikapi-aukus>
- CNN Indonesia, (2021, Oktober 21), "Mengenal AUKUS, Kesepakatan Kapal Selam Nuklir Bikin Gaduh", Dipetik Oktober 22, 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210921142233-113-697340/mengenal-aukus-kesepakatan-kapal-selam-nuklir-bikin-gaduh>

- European Council On Foreign Relations, (2021, Oktober 5), “*Trumpism by Another Name: What AUKUS Tells Us About US Policy in the Indo-Pacific*”, dipetik Oktober 20, 2021, dari <https://ecfr.eu/article/trumpism-by-another-name-what-aucus-tells-us-about-us-policy-in-the-indo-pacific/>
- Indepent, (2021, September 17), “*AUKUS: Indonesia Urges China and Australia Not to Embark on New Asia-Pacific ‘Arms Race’ After Nuclear Deal*”, dipetik Oktober 13, 2021, dari <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/aucus-nuclear-submarine-china-australia-b1921992.html>
- Kompas, (2021, Oktober 26), “*Ramai soal AUKUS, Ini Perbandingan Kekuatan Angkatan Laut China-Australia*”, dipetik Oktober 28, 2021, dari <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/26/061718570/ramai-soal-aucus-ini-perbandingan-kekuatan-angkatan-laut-china-australia?page=all>
- Tempo, (2021, September 18), “*Kenapa Prancis Marah Dengan Perjanjian AUKUS?*”, Dipetik Oktober 15, 2021, dari <https://dunia.tempo.co/read/1507710/kenapa-prancis-marah-dengan-perjanjian-aucus>
- The Guardian, (2021, September 16), “*China Warns US-UK-Australia Pact Could ‘Hurt Their Own Interests’*”, dipetik Oktober 16, 2021, dari <https://www.theguardian.com/world/2021/sep/16/cold-war-mentality-china-criticises-aucus-us-uk-australia-submarine-pact>
- The Washington Post, (2021, September 17), “*A Landmark Submarine Deal May Be Aimed at China, But It Has Upset France*”, dipetik Oktober 16, 2021, dari <https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/17/aucus-submarine-deal-shift/>